

Strategi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dalam Upaya Mencegah Kekerasan Berbasis Gender

Selvy Nur Amalia, Abid Rohman

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
selvyamalia95@gmail.com, abid.rohman@uinsby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the strategy of the Human Resources Development Agency (BPSDM) of East Java Province in implementing Sustainable Development Goals 5.2, especially through the implementation of the ASN Learning Series 39 Program themed "The Role of Women in Mental Health and Prevention of Gender-Based Violence." The problem raised in this study is to what extent the ASN Learning Series 39 Program organized by the BPSDM of East Java Province can be said to be a form of implementation of sustainable development goals, especially SDG 5.2 which targets the elimination of all forms of violence against women and children in public and private spaces. The approach used is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, documentation, and analysis of webinar materials. The study results show that this program reflects the implementation of SDG 5.2 through the delivery of educational materials, the involvement of cross-sector actors, and the strengthening of the role of ASN as agents of change.

Keywords: Sustainable Development Goals 5.2, ASN Learning, gender-based violence, Human Resources Development Agency, mental health

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan *Sustainable Development Goals (SDG) 5.2*, khususnya melalui pelaksanaan Program ASN Belajar Seri 39 yang bertema "Peran Perempuan dalam Kesehatan Mental dan Pencegahan Tindak Kekerasan Berbasis Gender." Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana Program ASN Belajar Seri 39 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya SDG 5.2 yang menargetkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di ruang publik maupun privat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis materi webinar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini mencerminkan implementasi SDG 5.2 melalui penyampaian materi edukatif, pelibatan aktor lintas sektor, dan penguatan peran ASN sebagai agen perubahan.

Kata kunci: Sustainable Development Goals 5.2, ASN Belajar, kekerasan berbasis gender, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kesehatan mental

PENDAHULUAN

Setiap orang berhak untuk hidup dalam rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan tanpa membedakan usia, jenis kelamin, maupun latar belakang. Perlindungan terhadap hak ini merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dua isu yang saling berkaitan dan kerap menempatkan

perempuan dalam posisi rentan secara global adalah kekerasan berbasis gender dan kesehatan mental. Berbagai laporan dan studi menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling terdampak oleh tekanan psikososial, ketidakadilan sistemik, serta berbagai bentuk kekerasan baik di ranah publik maupun domestik (Sultana, 2010). Laporan *Catatan Tahunan (CATAHU)* Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Meskipun jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 431.471 kasus, angka tersebut masih tetap tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius (Komnas Perempuan, 2020). Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kesehatan mental korban seperti gangguan kecemasan, depresi, hingga trauma jangka panjang (Rani et al., 2020:464–466).

Fakta ini menunjukkan bahwa isu kekerasan berbasis gender dan kesehatan mental perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perempuan tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai pihak yang perlu dilindungi tetapi juga perlu diberikan ruang untuk berperan aktif sebagai agen utama dalam upaya pencegahan dan pemulihan dari kekerasan berbasis gender. Peran ini mencakup kontribusi perempuan dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kesehatan mental baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat luas. Selain itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan baik dalam bentuk kebijakan publik, penguatan kelembagaan, maupun edukasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang bebas dari kekerasan dan mendukung pembangunan yang berkeadilan serta inklusif.

Sebagai bagian dari adanya komitmen global, Indonesia telah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya SDG 5.2 yang memiliki tujuan untuk “menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam ranah publik maupun privat” (United Nations, 2025). Di tingkat nasional, regulasi nasional seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu UU TPKS No. 12 Tahun 2022 yang telah sejalan dengan agenda global tersebut, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman mengenai isu gender, dan kuatnya budaya patriarki di masyarakat (Nurhaeni et al., 2023).

Dalam konteks ini, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat penting. ASN tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam mengintegrasikan prinsip keadilan gender ke dalam program-program pemerintah. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas ASN menjadi penting tidak hanya dalam aspek teknis dan administratif tetapi juga dalam pemahaman isu sosial, khususnya kekerasan berbasis gender dan kesehatan mental.

Di sinilah peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur menjadi signifikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan program pengembangan kompetensi ASN yang responsif terhadap tantangan-tantangan pembangunan berkelanjutan. Salah satu inovasi yang dikembangkan BPSDM adalah program ASN Belajar yang diselenggarakan secara daring dalam format webinar mingguan dengan berbagai

tema. Salah satu seri yang relevan dengan isu ini adalah ASN Belajar Seri 39 yang diselenggarakan pada tahun 2024, yang secara khusus mengangkat tema “Peran Perempuan dalam Kesehatan Mental dan Pencegahan Tindak Kekerasan Berbasis Gender.” Tema ini menjadi sangat relevan, mengingat masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan serta pentingnya pemulihan kesehatan mental sebagai bagian dari pembangunan sosial yang inklusif.

Seri ini menghadirkan tiga narasumber berkompeten, yakni Ratna Susianawati, SH, MH (Deputi Perlindungan Hak Perempuan, KemenPPPA), Drg. Vitria Dewi, M.Si (Direktur RS Jiwa Menur), dan Dr. Tri Wahyuni Liswati, M.Pd (Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur). Melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif, Ketiga narasumber tersebut memberikan perspektif yang komprehensif mengenai keterkaitan antara kesehatan mental, perlindungan hak perempuan, serta mendorong terbentuknya kesadaran kritis atas peran strategis perempuan dalam menciptakan lingkungan kerja dan sosial yang aman serta suportif.

Melalui Penelitian ini, penulis ingin mengkaji strategi BPSDM Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan SDG 5.2 melalui pelaksanaan Program ASN Belajar Seri 39, serta menilai sejauh mana substansi dan pelaksanaan kegiatan tersebut mencerminkan indikator-indikator implementasi SDG 5.2 sebagaimana yang dirumuskan dalam dokumen UN Women dan SDG 5 Tracker Technical Note (UN Women, 2022; Yount et al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran strategis lembaga pelatihan pemerintahan dalam mendukung agenda global melalui kegiatan pendidikan yang dirancang secara sistematis dan relevan dengan permasalahan sosial yang penting untuk segera ditangani.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Implementasi

Secara umum, Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan. Dalam kajian kebijakan publik, implementasi merujuk pada upaya untuk mewujudkan ide, gagasan, atau kebijakan menjadi tindakan nyata yang dapat diukur keberhasilannya. Lebih dari sekedar menjalankan kegiatan, proses implementasi juga mencakup bagaimana kebijakan tersebut diterima, dipahami, dan dijalankan (Ulfatihah, 2020).

Menurut pemikiran Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok baik dari sektor pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk menjalankan keputusan-keputusan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya (Van Meter and Van Horn, 1975). Sementara itu, menurut Mazmanian dan Sabatier implementasi adalah proses yang kompleks dan dinamis, bergantung pada *clarity of objective* (kejelasan tujuan kebijakan), *resource availability* (ketersediaan sumber daya), dan *external environment* (lingkungan eksternal yang mendukung) (Mazmanian and Sabatier, 1983).

Dengan kata lain, keberhasilan suatu implementasi tidak hanya bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut dirumuskan tetapi juga pada bagaimana

kebijakan tersebut dikomunikasikan, didukung secara politik dan administratif, serta sejauh mana para pelaksana di lapangan memiliki kapasitas dan komitmen untuk menjalankannya. Dalam konteks ini implementasi bukan sekadar tahapan teknis, melainkan proses strategis yang menentukan apakah sebuah kebijakan mampu mencapai tujuannya secara efektif dan berkelanjutan.

Sustainable Development Goals 5.2

Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu komitmen global yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2015 dengan tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Tujuan ini mencakup 17 poin utama yang mencakup berbagai aspek pembangunan manusia dan lingkungan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan yang layak, hingga kesetaraan gender. Salah satu tujuan tersebut adalah SDGs 5 yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan dan Anak Perempuan”.

Dalam Tujuan SDGs 5, terdapat beberapa target spesifik yang dirancang untuk mendukung pemberdayaan perempuan, termasuk target 5.2 yang berbunyi:

“Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ranah publik maupun privat, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta jenis-jenis eksploitasi lainnya (Yount et al. 2022).”

Target ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan dari segala bentuk kekerasan, baik dalam ruang domestik maupun publik.

Menurut dokumen resmi UN Women bertajuk *SDG 5 Tracker Technical Note target 5.2* dioperasionalkan melalui dua indikator utama yaitu;

1. Indikator 5.2.1

“Proporsi perempuan dan anak perempuan usia 15 tahun ke atas yang pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, atau psikologis oleh pasangan intim dalam 12 bulan terakhir, berdasarkan jenis kekerasan dan kelompok usia.”

Indikator ini berfokus pada kekerasan dalam hubungan domestik, dengan dimensi kekerasan fisik, seksual, dan psikologis.

2. Indikator 5.2.2

“Proporsi perempuan dan anak perempuan usia 15 tahun ke atas yang mengalami kekerasan seksual oleh pelaku selain pasangan intim dalam 12 bulan terakhir, berdasarkan usia dan lokasi kejadian.”

Indikator ini menyoroti kekerasan seksual di luar hubungan pasangan, baik di ranah publik maupun privat.

Kedua indikator tersebut tidak hanya menjadi tolok ukur pencapaian SDG 5.2 secara global, tetapi juga dapat digunakan secara kontekstual dalam penelitian untuk menilai apakah suatu program seperti ASN Belajar Seri 39 memiliki relevansi dan kontribusi terhadap tujuan ini (UN Women, 2022;3-5).

Kemudian, Data UN Women – *“Are We Getting There? A Synthesis of UN System Evaluations of SDG 5”*, juga menjelaskan bahwa dalam dokumen UN Women dan praktik evaluasi program SDG indikator tersebut diturunkan menjadi dimensi-

dimensi operasional untuk mengevaluasi program. Dari dokumen ini beberapa dimensi implementasi SDG 5.2 yang sering digunakan dalam evaluasi program adalah:

1. Edukasi publik tentang kekerasan berbasis gender
2. Pelibatan ASN atau institusi layanan dalam pencegahan
3. Dukungan terhadap kesehatan mental dan psikososial korban
4. Representasi dan pelibatan perempuan sebagai aktor utama
5. Kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan dan layanan
6. Penyediaan layanan hukum, sosial, dan Kesehatan
7. Advokasi dan penguatan kebijakan
8. Pengumpulan dan pemanfaatan data kekerasan (UN Women, 2024)

Dalam konteks penelitian ini, program ASN Belajar Seri 39 yang bertujuan meningkatkan kesadaran ASN terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan kesehatan mental dapat dianalisis melalui indikator-indikator di atas untuk menilai sejauh mana ia mencerminkan implementasi nyata dari SDG 5.2.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) 5.2 melalui kegiatan ASN Belajar Seri 39. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap dan mendeskripsikan fenomena sosial, terutama yang berkaitan dengan praktik kelembagaan dan nilai-nilai normatif dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis gender dan kesehatan mental (Moleong, 2017:4).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaksana kegiatan, yaitu Ibu Novita Ernawati yang memberikan informasi mengenai latar belakang, tujuan, serta proses perencanaan dan pelaksanaan ASN Belajar Seri 39. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi resmi berupa materi narasumber, notulensi webinar, Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), publikasi BPSDM, serta rekaman video webinar yang tersedia secara daring di kanal YouTube resmi milik BPSDM Jawa Timur (Siyoto & Sodik, 2015:68).

Metode pengambilan sampel dilakukan secara non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan subjek penelitian yang dianggap paling mengetahui permasalahan dan substansi program (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini, Ibu Novita Ernawati dipilih karena merupakan pelaksana kegiatan ASN Belajar dan memiliki peran langsung dalam desain serta penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kemudian untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari wawancara, dokumen, serta tayangan webinar. Teknik ini membantu memperkuat validitas dan kredibilitas data, sekaligus menghindari bias dari satu sumber tunggal.

HASIL & PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Novita Ernawati, selaku pelaksana kegiatan ASN Belajar Seri 39, diketahui bahwa pemilihan tema "*Peran Perempuan dalam Kesehatan Mental dan Pencegahan Tindak Kekerasan Berbasis Gender*" dilatarbelakangi oleh keprihatinan mendalam terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Menurutnya, persoalan kekerasan ini semakin kompleks karena berkaitan erat dengan dimensi kesehatan mental yang sering kali tidak tertangani secara optimal baik oleh korban sendiri maupun oleh lingkungan sosialnya. Lebih lanjut, Ibu Novita menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak sekadar ditujukan sebagai sarana sosialisasi atau penyampaian informasi semata, melainkan dirancang sebagai media edukatif yang dapat mendorong kesadaran aparaturnegara untuk memahami isu kekerasan berbasis gender tidak hanya sebagai masalah personal atau domestik, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kelembagaan khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja dan pelayanan publik yang aman, inklusif, dan setara gender.

Dalam wawancara yang sama, Ibu Novita juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi BPSDM dalam mendorong tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa "BPSDM Jatim melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan selain mendukung visi, misi Gubernur Jawa Timur juga mendukung tercapainya SDGs. Hal ini dimantapkan dengan adanya Corpu SDGs, di mana program dan kegiatannya diselaraskan untuk mencapai tujuan SDGs." Pernyataan tersebut memperkuat bahwa pelaksanaan ASN Belajar Seri 39 tidak berdiri sendiri, melainkan telah dirancang secara strategis sebagai kontribusi nyata BPSDM terhadap pencapaian SDG 5.2, yang menargetkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan SDGs sebagai dasar dari kegiatan, tema yang diangkat serta pendekatan lintas sektor yang digunakan menunjukkan bahwa BPSDM memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keberlanjutan, terutama dalam memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan di lingkungan birokrasi.

Di samping itu, Strategi penyusunan materi memperhatikan prinsip keadilan gender dan inklusivitas dengan melibatkan narasumber perempuan yang kompeten di bidangnya. Materi yang disampaikan oleh para narasumber memperlihatkan adanya suatu komitmen yang cukup kuat (Notulen Webinar ASN Belajar Seri 39, 2024; BPSDM Provinsi Jawa Timur, 2024). Ratna Susianawati, SH., MH. dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam materinya menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran HAM yang tidak hanya melukai fisik, tetapi juga mencederai martabat kemanusiaan dan menimbulkan dampak psikologis jangka panjang. Lebih jauh, beliau juga menjelaskan mengenai strategi nasional yang telah dirumuskan untuk mendorong kesetaraan gender dan perlindungan perempuan antara lain, melalui penguatan regulasi di kementerian/lembaga dan daerah, peningkatan partisipasi perempuan dalam mengambil kebijakan, serta penguatan sistem layanan bagi korban kekerasan. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara upaya edukasi ASN dalam

webinar ini dan pencapaian target SDG 5.2, khususnya dalam dimensi indikator pencegahan dan pemberdayaan. (BPSDM Provinsi Jawa Timur, 2024).

Kemudian narasumber kedua yaitu, drg. Vitria Dewi, M.Si dari RS Jiwa Menur, menyoroti tentang bagaimana tekanan mental dan gangguan psikologis yang dialami perempuan seringkali berakar dari pengalaman kekerasan di lingkungan rumah tangga, tempat kerja, hingga ruang publik. Beliau menegaskan bahwa kesehatan mental perempuan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya. Masih banyak perempuan ASN maupun pekerja swasta menghadapi tekanan ganda di tempat kerja dan keluarga yang apabila tidak ditangani dengan baik dapat menurunkan produktivitas bahkan memicu gangguan jiwa. Kemudian, drg. Vitria juga memberikan pemahaman bahwa menjaga kesehatan mental memerlukan kesadaran individu dan dukungan institusional. Strategi coping (penanganan) yang sehat, penyediaan ruang aman, serta pelibatan ASN dalam menciptakan tempat kerja yang inklusif menjadi bagian dari upaya SDG 5.2 (Notulen Webinar ASN Belajar Seri 39, 2024).

Narasumber ketiga yaitu, Dr. Tri Wahyuni Liswati, M.Pd., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, menyampaikan upaya konkret pemerintah daerah dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender melalui layanan terpadu. Beliau menjelaskan bahwa tingginya angka pelaporan kekerasan di Jawa Timur mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berbicara dan menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat dukungan institusional. Dalam paparannya, beliau menjabarkan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, dampaknya terhadap korban, serta sistem penanganan yang sudah diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui UPT PPA (BPSDM Provinsi Jawa Timur, 2024).

Berdasarkan hasil dokumentasi webinar, notulen, dan wawancara pelaksana, berikut ini adalah analisis keterkaitan antara materi ASN Belajar Seri 39 dan indikator-indikator SDG 5.2 yang relevan.

Tabel 1. Implementasi Indikator SDG 5.2 dalam Program ASN Belajar Seri 3 9

| Indikator SDGs 5.2 | Temuan dalam ASN Belajar Seri 39 | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. Pendidikan tentang kekerasan berbasis gender | Materi dari KemenPPA menjelaskan jenis-jenis KBG: fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi | Edukasi yang komprehensif kepada ASN tentang kekerasan dan urgensi perlindungan perempuan dan anak. |

| | | |
|--|--|--|
| 2. Fokus pada pelaku dan korban kekerasan | Pembahasan menyentuh tentang pelaku pasangan maupun nonpasangan, serta posisi Perempuan sebagai korban rentan. | Menunjukkan pemahaman mendalam bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di ruang domestik, tapi juga publik dan institusional. |
| 3. Pemahaman atas perlindungan hukum dan kebijakan | Disebutkan adanya UU TPKS No. 12 tahun 2022 dan kebijakan daerah tentang layanan perlindungan Perempuan dan anak (UPT PPA) | ASN diberi pemahaman bahwa perlindungan korban harus terintegrasi dengan kebijakan nasional dan lokal. |
| 4. Pencegahan dan advokasi institusional | Narasumber dari DP3AK menjelaskan peran ASN dalam mendukung sistem layanan dan menjadi pelindung kelompok rentan. | ASN diarahkan untuk berperan aktif menciptakan lingkungan kerja yang aman, responsif, dan bebas kekerasan. |
| 5. Dukungan terhadap Kesehatan mental Perempuan korban | RS Jiwa Menur menjelaskan dampak psikologis kekerasan dan pentingnya dukungan psikososial serta penyediaan ruang aman. | Kegiatan menekankan bahwa aspek pemulihan mental merupakan bagian penting dalam strategi perlindungan korban. |
| 6. Representasi dan pelibatan Perempuan sebagai agen utama | Seluruh narasumber perempuan dengan latar belakang strategis: pemerintahan pusat, daerah, dan layanan kesehatan mental. | Mewakili pelibatan perempuan sebagai pemimpin, edukator, dan pengambil keputusan dalam pencegahan kekerasan berbasis gender. |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| 7. Kolaborasi lintas sektor | BPSDM menggandeng KemenPPPA, RSJ Menur, dan DP3AK Jatim dalam perencanaan dan pelaksanaan webinar. | Menunjukkan pendekatan multisektoral dalam edukasi ASN, sesuai prinsip implementasi SDG 5.2 yang membutuhkan sinergi antar lembaga. |
|-----------------------------|--|---|

Berdasarkan uraian dalam Tabel 1. tersebut, dapat dilihat bahwa program ASN Belajar Seri 39 telah memuat sejumlah elemen kunci yang mencerminkan implementasi indikator-indikator SDG 5.2 baik dari segi isi maupun cara pelaksanaannya. Materi yang disampaikan, cara melibatkan narasumber, serta tanggapan peserta menunjukkan bahwa program ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu membentuk cara pandang kritis ASN terhadap berbagai isu sosial. Dengan demikian, program ini mencerminkan langkah nyata BPSDM dalam mengimplementasikan *Sustainable Development Goals 5.2* melalui program ASN Belajar seri 39 yang bertema “Peran Perempuan dalam Kesehatan Mental dan Pencegahan Tindak Kekerasan Berbasis Gender.”

KESIMPULAN

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan strategi yang relevan dan terukur dalam mengimplementasikan *Sustainable Development Goals (SDG) 5.2* melalui pelaksanaan Program ASN Belajar Seri 39. Program ini tidak hanya menjadi media sosialisasi, tetapi juga berfungsi sebagai platform edukasi yang mendorong peningkatan kesadaran kritis Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap isu kekerasan berbasis gender dan kesehatan mental perempuan. Melalui pendekatan tematik yang responsif dan kolaborasi dengan berbagai lembaga seperti KemenPPPA, RSJ Menur, dan DP3AK Provinsi Jawa Timur, kegiatan ini menunjukkan kerja sama lintas sektor yang penting dalam mendorong kesetaraan gender di lingkungan birokrasi. Materi yang disampaikan oleh para narasumber perempuan yang ahli di bidangnya juga menjadi contoh nyata bagaimana perempuan bisa terlibat dalam pengambilan keputusan dan berperan aktif dalam upaya pemberdayaan melalui pendidikan publik.

Secara keseluruhan, Program ASN Belajar Seri 39 dapat dikategorikan sebagai bentuk kontribusi kelembagaan terhadap pembangunan berkelanjutan yaitu, SDG 5.2 khususnya dalam hal edukasi, advokasi, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun kegiatan ini tidak secara eksplisit menyebut SDG 5.2 sebagai acuan utamanya, keterkaitan yang kuat dengan indikator yang dimuat dalam dokumen SDG 5 Tracker Technical Note dapat dilihat melalui substansi materi, metode penyampaian, serta tujuan dari kegiatan ini. Hal ini menandakan bahwa peran BPSDM sebagai lembaga pelatihan ASN memiliki potensi strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- BPSDM Provinsi Jawa Timur. *ASN Belajar Seri 39: Peran Perempuan dalam Kesehatan Mental dan Pencegahan Tindak Kekerasan Berbasis Gender*. YouTube video, 3:14:16. Posted October 10, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=s3OnPiECOxI>.
- Komnas Perempuan. (2020). *Lembar Fakta dan Temuan Kunci: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Mazmanian, Daniel A., and Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman.
- Meter, Carl E. Van., and Carl E. Van Horn. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. PT Remaja Rosdakarya
- Notulen Webinar ASN Belajar Seri 39. *Peran Perempuan dalam Kesehatan Mental dan Pencegahan Tindak Kekerasan Berbasis Gender*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, 10 Oktober 2024. File dokumen Microsoft Word.
- Nurhaeni, I. D. A., Amalia Fitri., dan Fathurrahman. (2023). "Gender Mainstreaming in Indonesian Local Governance: Between Policy and Practice." *Jurnal Spirit Publik*, 19(2), 123–140.
- Rani, M., et al. (2020). "The Mental Health Consequences of Gender-Based Violence." *The Lancet Psychiatry*, 7(6), 464–466.
- Siyoto, Sandu., dan M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sultana, A. (2010). "Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis." *The Arts Faculty Journal*, 4(1), 1–18.
- Ulfatihah, Hernita. (2020). *Implementasi Tabungan Baitullah iB Hasanah dan Variasi Akad pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*. [Laporan Akhir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- UN Women. (2022). *Technical Note – SDG 5 Global, Regional and Country Assessments*. UN Women.
- UN Women. (2024). *Are We Getting There? A Synthesis of UN System Evaluations of SDG 5*. UN Women.
- United Nations. *Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls*. United Nations Sustainable Development Goals. Accessed May 15, 2025. <https://sdgs.un.org/goals/goal5#undefined>.
- Yount, Kathryn M., Irina Bergenfeld., Nishat Mhamud., Cari Jo Clark., Nadine J. Kaslow., dan Yuk Fai Cheong. (June 17, 2022). "Monitoring Sustainable Development Goal 5.2: Cross-Country Cross-Time Invariance of Measures for Intimate Partner Violence." *PLoS ONE*, 17(6).